

IMPLEMENTASI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KECAMATAN SIDOARJO

Oleh:

Nita Arum Sari,

Hendra Sukmana

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April, 2025



Pendahuluan

Perubahan pelayanan berbasis teknologi informasi (IT) menjadi aspek penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. **Transformasi** ini sejalan dengan program "*Indonesia Digital Nation*" yang mendorong penggunaan teknologi di berbagai sektor [1]. Program tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan terhadap perkembangan teknologi serta memanfaatkan kebutuhan teknologi di berbagai sektor.

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam administrasi kependudukan, pemerintah Indonesia memperkenalkan Aplikasi **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** sebagai inovasi layanan berbasis teknologi. Implementasi Aplikasi IKD melibatkan penggunaan enkripsi data dan autentikasi ganda untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna, serta mematuhi standar perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi** (UU PDP). UU ini mengharuskan penyedia layanan digital, termasuk IKD, untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat guna mencegah penyalahgunaan data pribadi.

Di Kecamatan Sidoarjo penerapan program IKD mencapai angka **17.698 orang**. Angka ini terhitung sejak diluncurkannya pada tahun 2022, dimana awal uji coba tersebut dilaksanakan secara bertahap kepada para pegawai di lingkungan pemerintahan, Para guru dan pengurus sekolah serta pegawai di lingkungan puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo. Data lain menunjukkan bahwa masih ditemukannya sedikit masyarakat yang melakukan aktivasi sehingga kurangnya partisipasi masyarakat ini dapat menyebabkan penerapan ini tidak seimbang. Maka, akan menjadi tantangan yang harus dihadapi kedepannya.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Berdasarkan wawancara dengan kepala sub-bagian umum dan kepegawaian, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan implementasi IKD ini masih terdapat sedikit permasalahan. Dimana, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data dalam aplikasi sehingga membuat peranan dan kontribusi di beberapa wilayah masih minim. Hal ini dapat berdampak pada implementasi pelaksanaan transformasi digital secara nasional.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih tempat penelitian di Kecamatan Sidoarjo karena ingin mengetahui langkah implementasi yang digunakan dalam mewujudkan upaya transformasi digital dalam hal administrasi kependudukan. Melalui penelitian ini, akan dikaji sejauh mana kebijakan IKD telah diterapkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Sidoarjo.”**

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus dalam penelitian ini terdapat pada Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Sidoarjo yang mengacu pada teori implementasi kebijakan George Edward III yang terdiri atas empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan yang dinilai memahami secara langsung permasalahan terkait. Informan yang dimaksud diantaranya Kepala Sub Bagian Layanan, Petugas Layanan, serta dua masyarakat yang telah menggunakan layanan aplikasi IKD. Adapun sumber data yang diterapkan yakni data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan informan, observasi langsung, serta mencatat data yang relevan dengan fakta di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui membaca, mengamati dan mendengarkan dokumen literatur, jurnal, hingga media massa. Dalam proses analisis data penelitian, menurut Miles dan Huberman yang meliputi 4 tahapan [17], yakni: pengumpulan data, reduksi data penyajian data hingga penarikan kesimpulan dengan menyatukan semua data yang diperoleh penulis di lapangan.

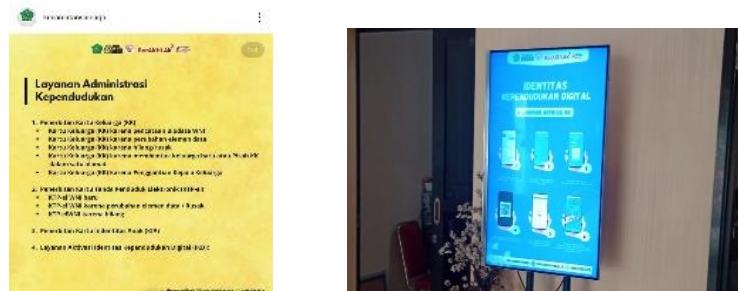
Hasil dan Pembahasan

Gambar 1.1 Materi Sosialisasi Saat Turun Lapangan di Kecamatan Sidoarjo



Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Sidoarjo (2024)

Gambar 1.2 Dokumentasi Saluran Informasi Terkait Layanan IKD



Sumber: Diolah dari sosial media dan dokumentasi peneliti di Kecamatan Sidoarjo (2024)

Berdasarkan hasil pengumpulan data terkait **indikator komunikasi** menurut teori kebijakan implementasi George Edward III (dalam nugroho, 2003) **sudah sesuai** sebab mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat selaku pengguna sehingga masyarakat dapat menyadari keuntungan dari adanya inovasi tersebut. Pihak Kecamatan Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk penyampaian informasi, pengenalan aplikasi IKD ini juga menggunakan berbagai saluran komunikasi mulai dari sosial media, spanduk, himbauan saat pelayanan administrasi langsung, hingga kegiatan turun lapangan. Dengan adanya sosialisasi dan juga pelatihan yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil Sidoarjo memberikan pemahaman baik tentang cara menggunakan aplikasi, dari sisi teknis maupun fungsional. Hal ini selaras dengan prinsip Edward III bahwa keberhasilan komunikasi terletak pada konsistensi penyampaian informasi dari pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Komunikasi dengan berbagai pihak dalam konteks masyarakat menjadi faktor pendorong agar mereka dapat terus mengikuti laju pertumbuhan teknologi.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1.3 Petugas Layanan Di Kecamatan Sidoarjo

No.	Nama	Jabatan
1.	Dadang Adi Pramana, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Ratnaningsih	Pengadministrasian Umum
3.	Rosi Wahyuni	Pengadministrasian Kependudukan
4.	Shon Haji	Pengadministrasian

Sumber: Diolah dari Kecamatan Sidoarjo (2024)

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan terkait dengan **indikator sumber daya** dalam implementasi aplikasi IKD di Kecamatan Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa **sudah sesuai** dan berjalan dengan baik selain karena sumber daya manusia tercukupi, infrastruktur teknologi yang ada di wilayah kecamatan juga memadai. Menurut George Edward III, tanpa sumberdaya yang memadai, implementasi kebijakan hanya akan berakhir sebagai dokumen tanpa aksi nyata. Ketersediaan sumber daya manusia merupakan pilar utama keberhasilan kebijakan. Di Kecamatan Sidoarjo, jumlah petugas mungkin terbatas, namun mereka didukung dengan distribusi tugas yang baik dan kemauan untuk membantu secara aktif terutama apabila terjadi lonjakan permohonan di desa ataupun kelurahan setempat. Tak hanya itu, Kecamatan Sidoarjo telah menyediakan infrastruktur seperti jaringan internet gratis dan perangkat lain berupa tablet yang dimana menunjukkan bahwa pihak kecamatan siap memberikan layanan yang optimal. Dukungan ini sangat dihargai oleh masyarakat, yang merasakan manfaat dan kemudahan akses aplikasi IKD.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1.4 Status Aktivasi IKD Kecamatan Sidoarjo Tahun 2024

Status Pengguna	Jumlah
Teraktivasi	19.467 User
Belum di Aktivasi	299 User

Sumber: Diolah dari Kecamatan Sidoarjo (Desember, 2024)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jika dikaitkan teori implementasi kebijakan George Edward III (dalam nugroho, 2003) mengenai **indikator disposisi belum berjalan secara maksimal** sebab kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan Masyarakat menghadapi teknologi masih menjadi tantangan. Meskipun banyak masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi ini, kendala teknis dan keraguan terkait keamanan data memperlambat proses implementasi. Dalam teori Edward III, menekankan bahwa disposisi pelaksana yang dilandasi rasa tanggung jawab akan memperkuat konsistensi dan kualitas implementasi kebijakan. Di Kecamatan Sidoarjo, dengan adanya pakta integritas petugas memperkuat integritas dan mendorong pelaksana untuk berhati-hati dan profesional dalam memberikan pelayanan. Ketimpangan disposisi antara pelaksana dan masyarakat menimbulkan kesenjangan dalam keberhasilan implementasi. Meskipun pelaksana sudah siap dan memiliki semangat tinggi, apabila masyarakat belum siap atau enggan berpartisipasi, maka tujuan kebijakan sulit tercapai secara menyeluruh. Hal ini terlihat dalam data status aktivasi IKD, di mana masih terdapat pengguna yang belum menyelesaikan proses aktivasi. Sehingga perlu intervensi lanjutan melalui edukasi serta peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem.

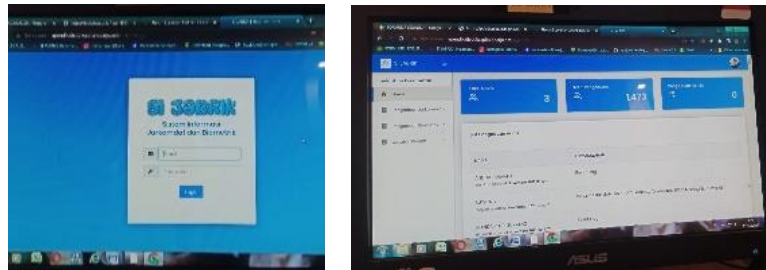
Hasil dan Pembahasan

Tabel 1.5 SOP Layanan Aktivasi IKD Di Kecamatan Sidoarjo

Urutan	Prosedur Layanan Aktivasi IKD	Pelaksana
Pertama	Pemohon datang ke kantor kecamatan dan telah menginstall aplikasi IKD melalui playstore atau appstore	Pemohon
Kedua	Pemohon menginput data diri dan melakukan verifikasi wajah pada aplikasi IKD	Pemohon
Ketiga	Petugas adminduk melakukan Scan QR Code	Petugas
Keempat	Pemohon memasukkan kode aktivasi dari email SIAK Terpusat	Pemohon
Kelima	Melakukan proses Aktivasi IKD	Pemohon
Keenam	Pemohon telah memiliki IKD yang telah diaktivasi	Pemohon

Sumber: Diolah dari pemerintah Kecamatan Sidoarjo (2024)

Gambar 1.4 Dokumentasi SIJABRIK dalam membantu komunikasi dengan pihak pusat



Sumber: Diolah dari dokumentasi peneliti di Kecamatan Sidoarjo (2024)

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (dalam nugroho, 2003) tentang **indikator struktur birokrasi** dapat disimpulkan bahwa **sudah sesuai** dengan baik. Kecamatan Sidoarjo telah menetapkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas dan rutin diperbarui. Hal ini menunjukkan prosedur kebijakan yang tidak asal, melainkan adaptif melalui evaluasi dan diskusi secara berkala membuat koordinasi antar instansi seperti kecamatan dan Disdukcapil berjalan maksimal. Komunikasi aktif dilakukan melalui grup WhatsApp dan sistem pelaporan SIJABRIK. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa birokrasi mampu bersinergi lintas unit tanpa terhambat sekat administratif yang kaku. Dalam teori Edward III, koordinasi vertikal dan horizontal sangat penting untuk mencegah konflik tanggung jawab serta mempercepat pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya sarana komunikasi yang lebih terstruktur membuat keamanan data lebih terjaga juga menciptakan transparansi sehingga indeks kepuasan terkait layanan dapat mengalami peningkatan.

Temuan Penting Penelitian

Implementasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Kecamatan Sidoarjo telah berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan angka pengguna yang telah melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat. Dalam lingkungan sosial, masyarakat menunjukkan perubahan positif dengan tetap menerapkan penggunaan aplikasi tersebut, pengarahan dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Sidoarjo kepada pihak-pihak terkait menjadi kunci keberhasilan program transformasi digital ini. Namun, masih terdapat kendala pada Tindakan Masyarakat lanjut usia, dimana menunjukkan resistensi atau keraguan terhadap keamanan aplikasi, serta kendala teknis dalam penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan program. Di sisi lain, pengenalan melalui sosialisasi juga rutin dilakukan pemerintah kecamatan dalam meningkatkan pemahaman terkait menjaga keamanan data pribadi warga tentang administrasi kependudukan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Kecamatan Sidoarjo sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi aplikasi identitas kependudukan digital. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya aplikasi Identitas kependudukan digital serta peran Masyarakat dalam mendukung transformasi digital di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menjadi referensi ilmiah bagi akademisi untuk penelitian lebih lanjut terkait program aplikasi IKD khususnya di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa. Bagi pengambil kebijakan, temuan penelitian ini dapat memberikan data yang relevan untuk menyusun atau memperbaiki kebijakan dan program digitalisasi di tingkat lokal hingga nasional.

Referensi

- [1] Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Visi Indonesia Digital 2045*. 2024. [Online]. Available: https://digital2045.id/bukuvid2045/%0Ahttps://drive.google.com/file/d/1BF0f-vkQRuqfFCb-tHCn6tCT3wHYgD2l/view?usp=drive_link
- [2] L. Rizkinaswara, “Revolusi Industri 4.0. Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.” 2020, 28 Januari. [Online]. Available: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>
- [3] Sekretariat, “Dirjen Dukcapil: IKD Inline dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.” Accessed: Nov. 12, 2024. [Online]. Available: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/dirjen-dukcapil-ikd-inline-dengan-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik>
- [4] Firdaus, Nurlina, and Nursamsir, “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Meningkatkan Digitalisasi Pelayanan Publik,” *J. Perspekt. Adm. Dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 53–63, 2023, doi: 10.38062/jpab.v4i1.447.
- [5] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,” *Peratur. Pres.*, no. 004185, pp. 1–35, 2019, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- [6] Kementerian Dalam Negeri RI, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital,” *Kementeri. Dalam Negeri RI*, pp. 1–32, 2022.
- [7] R. Nugroho, *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- [8] A. M. H. dan J. S. Miles, Matthew B, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Ketiga. Sage Publications: Inc, 2014.

